



Merumuskan Parkir Premium di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berencana untuk mengkaji tarif parkir di kawasan Malioboro. Seperti diketahui, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat melontarkan wacana terkait penerapan parkir premium di Malioboro Kota Yogyakarta tersebut. Wacananya adalah dengan memberlakukan tarif parkir progresif ber-

dasarkan jarak menuju Malioboro. Semakin dekat lahan parkir dengan Malioboro, tarifnya akan semakin mahal hingga mencapai Rp60 ribu. Sebaliknya, jika menjauhi Malioboro tarifnya semakin murah. Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwi-panti Indrayanti mengungkapkan,

● ke halaman 11

Merumuskan Parkir Premium

● Sambungan Hal 1

sebenarnya langkah pemberlakuan parkir progresif telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Hanya saja, tarif yang ditetapkan masih tergolong rendah.

"Sekarang sudah dibagi per zona, cuma nilainya masih bisa diubah. Semuanya perlu dianalisis, ya, kan (Malioboro) kawasan premium, parkir itu juga perlu ditata," jelas Made kepada *Tribun Jogja*, Jumat (4/6).

Langkah itu ditempuh sebagai salah satu upaya untuk menata kawasan Malioboro. Terlebih volume kendaraan pribadi menuju kawasan ini kerap membludak, sehingga lalu lintas menjadi sulit diatur.

Terutama tiap akhir pekan atau momen libur panjang. Bahkan sering menimbulkan kesan yang semrawut. "Ketika kawasan bangkutan yang terlalu banyak mobilitas angkutan pribadi, ya, kenapa saja parkir mahal," jelasnya.

Dengan adanya pemberlakuan tarif parkir premium, diharapkan wisatawan dan masyarakat dapat tergerak untuk memanfaatkan moda transportasi umum. Made pun berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas transportasi umum di DIY agar masyarakat mau meng-

gunakannya.

"Iya kita semua harus sama-samalah. Macet disebabkan apa, sili. Angkutan pribadi terlalu banyak. Karena orang juga tidak mau pakai angkutan umum yang kita sediakan. Angkutan umum kita juga harus bagus. Ini PR (pekerjaan rumah) bersama," jelasnya.

Lebih jauh, untuk mencegah munculnya parkir liar perlu dilakukan pengawasan lebih ketat. Juga payung hukum terkait nominal tarif parkir dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta. "Itu diawasi sehingga tidak liar, (harganya) tidak ditentukan oleh oknum. Nanti ditentukan kota," jelasnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan pihak Dishub Kota Yogyakarta untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Tunggu arahan

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho menyambut baik wacana parkir premium di kawasan Malioboro. Namun dirinya mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut. "Masalah teknisnya nanti, ya, perlu pembahasan lebih lanjut," jelasnya.

Sebenarnya, Pemkot Yogyakarta telah memiliki payung hukum pemberlakuan tarif parkir, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

dan Tempat Khusus Parkir.

Dalam Perda tersebut juga diatur pembagian kawasan yakni kawasan satu atau premium, kawasan dua, dan tiga. Adapun tempat parkir yang masuk dalam kategori premium adalah seluruh tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemkot Yogyakarta.

Tarif parkir di kawasan satu dihitung secara progresif berdasarkan lama waktu parkir. Agus mengakui bahwa harga tarif parkir saat ini masih tergolong murah. "Murah, ya, sesuai perda. Kalau memang aturannya dibuat ya tergantung nanti kebijakannya bagaimana. Nanti kita tunggu petunjuk dari beliau (Sri Sultan HB X)," jelasnya.

Seharusnya, lanjut Agus, tarif parkir di kawasan wisata bisa mencontoh parkir di pusat perbelanjaan. Di mana ada pengelompokan antara parkir normal hingga VIP. Namun perbedaan tarif parkir itu harus dibarengi dengan pelayanan yang berbeda. "Saya kira apa yang diwacanakan Pak Gubernur cukup bagus," ujarnya.

Dukungan

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mendukung rencana Pemda DIY untuk mewujudkan parkir premium di kawasan Malioboro. Kebijakan dengan menerapkan tarif parkir yang tergolong mahal diharapkan dapat membatasi kendaraan pribadi yang hendak parkir di kawasan itu.

Dengan demikian, rencana

Pemda DIY untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian dapat terwujud. "Dengan parkir premium bisa memperbanyak orang jalan kaki dibanding naik mobil dan parkir. Meskipun saat ini, Malioboro jadi sepi-pedestrian, waktu pukul 18.00-21.00 WIB karena ada keluhan masyarakat," terang Huda kepada *Tribun Jogja*.

Dia menjelaskan, parkir di Malioboro secara umum memang dibatasi akibat upaya penataan yang terus dilakukan. Huda lantas membandingkan kondisi Malioboro beberapa tahun lalu. Di mana pengunjung sempat bebas memarkir kendaraannya bahkan di sepanjang trotoar Jalan Malioboro hingga Ahmad Yani sehingga terkesan tak tertata.

"Intinya kita ingin agar tidak terlalu banyak yang parkir di Malioboro tapi banyak pengunjung yang jalan kaki lalu parkirnya di sekitar Malioboro. Misalnya di Abu Bakar Ali," jelasnya. "Dengan parkir mahal itu bisa jadi penghalang untuk orang parkir di Malioboro. Jadi itu kebijakan yang logis," imbuh Huda.

Jika ingin merealisasikan wacana tersebut, Huda meminta agar ada kejelasan regulasi terkait tarif dan kawasan khusus parkir. Harus diikuti dengan penetapan perda di kota, ya. Kalau terlalu banyak kendaraan kan tidak nyaman juga kalau berjalan kaki," jelasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005